

# SKRIPSI

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM  
PERKARA NOMOR : 144/PDT.G/2012/PN.PDG MENGENAI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh :**

**Rifky Pernanda Putra**

**1310112155**

**Program Kekhususan : Hukum Bisnis (PK II)**



**Pembimbing :**

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H  
Neneng Oktarina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM  
PERKARA NOMOR : 144/PDT.G/2012/PN.PDG MENGENAI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING**

Rifky Pernanda Putra. 1310112155.Fakultas Hukum Universitas Andalas.

PK II(Perdata Bisnis).91 halaman, tahun 2019

**ABSTRAK**

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat pengertian fidusia. Fidusia adalah : Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilikan benda itu.Jaminan fidusia ini wajib didaftarkan, Pendaftaran jaminan fidusia ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi kedua belah pihak, apalagi penerima fidusia, sehingga tercatat dalam buku pendaftaran akta fidusi yang dibuat notaris, dan perjanjian tersebut bersifat mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang fidusia. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu BAB V Pasal 18 ayat 1, diatur tentang perlindungan konsumen, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang **EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM PERKARA NOMOR : 144/PDT.G/2012/PN.PDG MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING** Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apa alasan konsumen memilih mengajukan gugatan biasa dibandingkan dengan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 12/BPSK/PDG/PTS/M/II/2012 ke pengadilan negeri dan (2) Bagaimana Pelaksanaan Esekusi Putusan Pengadilan Negeri Padang Dalam Perkara Nomor : 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg ?.Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris (*Social Legal Research*)yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dikaitkan dengan kenyataan yang dilapangan atau mempelajari yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini yang pertama alasan dari Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor: 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg majelis hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 14 dan 15 UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan menghukum tergugat untuk mengembalikan kepada penggugat mobil avanza BA 1005 A. Akan tetapi eksekusi putusan 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg belum dapat dilaksanakan dikarenakan penggugat meninggal dunia, dan dialihkan kepada pihak keluarga, dan pihak leasing beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan menawarkan pihak keluarga(anak Ibu Fatmiwati) untuk menyelesaikan masalah ini di kantor pihak leasing dan pihak ahli waris menyetujui penyelesaian di kantor pihak leasing. Namun pihak keluarga sampai saat ini tidak pernah datang lagi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan eksekusi